BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Untuk memepercepat penyediaan infrastruktur, pemerintah memberikan dukungan dengan memberikan kompensasi dalam bentuk kerjama investasi, subsidi, garansi dan penghapusan pajak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005. Kompensasi diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang lolos dalam penyaringan KKPPI (Komite & Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur) dan Komite Pengelolaan Resiko Departemen Keuangan (KPRDK). Perpres No. 67 Tahun 2005 merupakan pengganti keputusan Presiden No. 7 Tahun 1989. Perpres baru ini bertujuan untuk mengakomodasi perubahan paradigma dalam kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta dalam penyediaan infrastruktur, antara lain berupa penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah (Posumah. 2015).

Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan (Atmaja &

Mahalli. 2013) infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Menurut Ja'far, (2007) Infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi serta jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait. Peran lainya adalah infrastruktur sebagai prasarana jaringan dasar dari keberadaan dari suatu kota atau wilayah merupakan faktor penting didalam keberlangsuangan dan pertumbuhan kota atau wilayah (Palilu. 2018)

Menurut Suryawardana et al (2015) menyatakan infsrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi. Jalan raya merupakan prasarana utama dalam pengembangan perekonomian suatu wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan selain itu, lancarnya akses suatu daerah ke daerah lain yang akan mempermudah transportasi masyarakat di sekitarnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang mereka miliki. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun (2004) Tentang Jalan dimana jalan berperan sebagai prasarana transportasi yang memiliki peran penting dalam ekonomi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai prasarana distribusi barang dan merupakan kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan meningkat suatu wilayah.

Kondisi ruas jalan yang buruk akan menghambat lalulintas prekonomian suatu daerah yang dimana berimbas pada kelancaran akses perekonomian suatu masyarakat yang mengakibatkan mobilitas antara daerah dan distribusi barang menjadi sulit (Iriyena et al. 2019) Pengembangan jalan bukan hanya terbatas pada pembuatan jalan baru, namun juga pada peningkatan kapasitas maupun kualitas jalan (Syahrul & Suryani. 2016) Dengan demikian maka harus dikembangkan infrastruktur jaringan jalan sebagai bagian dari pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaiamana dijelaskan pada Undang-Undang No. 22 Tahun (2009) mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perkembangan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaranya lalulintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, otomi daerah serta akuntabilitas penyelanggara negara. Oleh karena itu setiap negara melakukan investasi yang besar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan. Sekitar 0,8 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) Negara Berkembang dikeluarkan untuk pembangunan dan pengembangan jalur rehabilitasi jalan (Fay. 1999)

Menurut Suryawardana et al (2015) infrastruktur jalan mempunyai pengaruh yang yang positif terhadap manfaat sosial ekonomi, hal ini karena perubahan-perubahan yang terjadi pada manfaat sosial ekonomi, dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dari infrastruktur jalan, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Menurut Ompusunggu (2012) pembangunan jalan akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi pedagang untuk berdagang di sepanjang jalan dengan demikian akan berdampak positif pada sosial ekonomi pedagang. Sejalan dengan hal tersebut menurut Andriyani (2018) pembangunan infrastruktur (perbaikan jalan) berdampak positif kepada

masyarkat yang notabenenya merupakan pedagang yang membuka usahanya di pinggir jalan. Perbaikan jalan tersebut membuat usaha mereka semakin ramai dan berdampak pada meningkatnya pedapatan pedagang. Sehingga dapat disimpulkan pembangunan infrastruktur jalan/perbaikan jalan memberikan dampak yang positif tidak hanya akan berdampak pada meningkatnya aksesbilitas tetapi juga berdapak pada sosial ekonomi pedagang di sekitar pembangunan jalan.

Bali sebagai salah satu wilayah dengan sebaran yang cukup tinggi juga mengalami ketidakmeraatan dalam percepatan pembangunan antar wilayah (Dewi et al. 2010) Kesenjangan pembangunan infrasruktur yang terjadi di Provinsi Bali yaitu antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan infrastruktur tersebut maka Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membuat proyek jalan *shortcut* Singaraja-Mengwitani. Selain untuk meratakan pembangunan infrastruktur di Bali jalan *shortcut* ini juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan dikawasan wisata (Bedugul) pada hari libur dan hari keagamaan karena jalan tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan antara Bali Utara dengan Bali selatan. Dengan keberadaan jalan *shortcut* ini dapat mengurangi jarak jarak tempuh dari Denpasar-Singaraja yang biasanya ditempuh dari waktu 3 jam menjadi 2 jam dengan mengurangi jumlah tikungan yang ada.

Jalan *shortcut* Singaraja-Mengwitani memiliki 10 titik yang terbagi 6 titik di wilayah Kabupaten Buleleng dan 4 titik berada di Kabupaten Tabanan. Jalan *shortcut* tersebut memiliki panjang jalan mencapai 12,79 kilometer dan dengan ruas jalan yang dibangun dengan lebar 7 meter dan 2 meter untuk bahu jalan. Jalan *shortcut* Singaraja-

Mengwitani juga dirancang lebih landai tingkat kemiringannya menjadi 6 derajat yang pada jalan sebelumnya mencapai 10-15 derajat untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan (PU-Net. 2020) Jalan Shortcut Singaraja-Mengwitani akan memudahkan bus-bus pariwisata untuk mengunjungis Bali Utara dengan demikian potensi wisata bisa diharapkan akan berkembang. Namun disisi lain beberapa ruas jalan shortcut ini diberlakukan manajemen lalu lintas satu arah sehingga akan berdampak pada pedagang pasar.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, setelah diberlakukannya manajeman lalu lintas satu arah titik jalan *shortcut* (titik 3-4) kondisi pembeli jauh lebih sepi dibandingankan sebelum terselesaikannya jalan *shortcut* Singaraja-Mengwitani ini. Adapun kondisi pedagang Pasar setelah diberlakukanya manajemen lalu lintas satu arah dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1. Kondisi Pedagang Pasar di Desa Candikuning

Sumber : Astini. 2020

Sejauh mana dampak pembangunan jalan *shortcut* ini terlebih dengan adanya manajeman lalu lintas satu arah terhadap kondisi sosial-ekonomi perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jalan *shortcut* Singaraja-Mengwitani apakah berpengaruh positif atau tidaknya terhadap sosial ekonomi pedagang pasar, sehingga kebijakan yang tepat dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan khususnya mengenai pedagang pasar. Selain itu adanya unsur kebaharuan karena belum ada penelitian yang mengkaji perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada pedagang pasar di Desa Candikuning, Baturiti, Tabanan. Berdasarkan uraian tersebut menarik dilakukan penelitian dengan judul "Studi Komparatif Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Di Desa Candikuning, Baturiti, Tabanan ".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi yang dialami pedagang pasar di Desa Candikuning, Baturiti, Tabanan akibat adanya pembangunan jalan *shortcut* Singaraja-Mengwitani. Penelitian ini lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi pedagang pasar sebelum dan sesudah dibangun jalan shortcut.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian menjadi lebih sistematis, terarah dan terfokus maka penelitian ini diberikan batasan masalah untuk memberikan kedalam kajian sebagai berikut :

a) Bidang Keilmuan

Dilihat dari bidang keilmuannya penelitian ini hanya terbatas pada sosial ekonomi.

b) Objek

Dilihat dari objek yang dikaji, penelitian ini hanya terbatas pada sosial ekonomi pedagang pasar di Desa Candikuning, Baturiti, Tabanan akibat pembangunan jalan *shortcut* Singaraja-Mengwitani.

c) Subjek

Dilihat dari subjeknya, penelitian ini hanya terbatas pada pedagang pasar itu sendiri yang akan dijadikan sebagai responden untuk memperoleh data atau informasi mengenai objek kajian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan terkait masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi pedagang pasar di Desa Candikuning sebelum pembangunan jalan *shortcut* Singaraja-Mengwitani ?
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi pedagang pasar di Desa Candikuning sesudah pembangunan jalan *shortcut* Singaraja-Mengwitani ?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kondisi sosial ekonomi Pedagang Pasar di Desa Candikuning sebelum dan sesudah pembangunan jalan *shortcut* Singaraja-Mengwitani ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi pedagang pasar di Desa Candikuning sebelum pembangunan jalan *shortcut* Singaraja-Mengwitani.
2. Mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi pedagang pasar di Desa Candikuning sesudah pembangunan jalan *shortcut* Singaraja-Mengwitani.
3. Mendeskripsikan apakah terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kondisi sosial ekonomi pedagang pasar di Desa Candikuning sebelum dan sesudah pembangunan jalan *shortcut* Singaraja-Mengwitani.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. **Secara Teoritis**

   Mempertajam kajian yang berkaitan dengan bidang geografi sosial dan geografi ekonomi.

2. **Secara Praktis**

   1) **Bagi masyarakat di Desa Candikuning**

      Dapat sebagai penambahan wawasan dan informasi masyarakat mengenai dampak yang di timbulkan dalam pembangunan *shortcut* khususnya bagi pedagang pasar di Desa Candikuning

      Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha

      Hasil penelitain ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap perbendaharaan penelitian sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2) Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan masukan dalam membuat kebijakan dan tindakan pembangunan infrastruktur dan menganalisis dampaknya bagi masyarakat.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA